

REFERENSI MICE INDONESIA

EDISI 197

VENUE

APRIL-JUNI
2025

**EFISIENSI ANGGARAN
MEMICU TURBULENSI
SEKTOR PARIWISATA
DAN MICE**



ASHLEY
HOTEL GROUP

Celebrate Love with

GRACE & TRADITION

at Ashley



Start from **Rp 9,800,000.-** / 30pax



Ashley Tanah Abang & Ashley Wahid Hasyim

+62 877-4038-5808

ashleyhotelgroup.com

Ashley Hotel Jakarta

@ashleyhoteljkt

wonderful
indonesia

We love serving you

Agar Konser Bebas dari Pelanggaran Hak Cipta



Persoalan royalti masih menjadi momok dalam industri musik nasional. Sebelumnya, kasus Agnes Mo dengan Ari Bias sempat ramai jadi bahan berita. Agnes Mo dituntut membayar denda sebesar Rp1,5 miliar karena dianggap tidak mendapatkan izin menyanyikan lagu dari si pencipta. Babak berikutnya giliran Vidi Aldiano yang dituntut Rp24,5 miliar oleh Keenan Nasution. Persoalannya pun kurang lebih serupa, yaitu pembayaran royalti lagu.

Belum adanya kesepakatan mengenai sistem pemungutan royalti itu membuat promotor atau *event organizer* harus berpikir ekstra keras ketika akan menggelar sebuah pertunjukan musik. Terpeleset sedikit, mereka bakal ikut terseret ke meja hijau.

Merujuk Permenkumham No. 20/2021, telah diatur mengenai tarif royalti pertunjukan musik yang dipungut oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), meskipun banyak yang mengkritisnya karena dianggap belum adil oleh banyak pihak.

Dalam Permenkumham tersebut, pencipta lagu yang telah menyerahkan hak lisensi karya pada LMK, maka tarif yang dikenakan sebesar 2-5 persen dari tiket yang terjual. Kemudian, LMK akan mendistribusikannya kepada pencipta, penulis lagu, atau komposer dari lagu-lagu yang dimainkan dalam sebuah pertunjukan musik.

Kemudian, bagaimana jika hak lisensi karya itu belum diserahkan kepada LMK? Mau tak mau *organizer* harus mengurus izin dan pembayaran royalti langsung kepada pemilik karya. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada pasal 13 disebutkan bahwa: Penggunaan ciptaan orang lain untuk tujuan komersial (misalnya konser, pertunjukan umum) harus dengan izin dari pemegang hak cipta. Kemudian, pada pasal 21 diterangkan juga bahwa: Pencipta berhak mendapatkan imbalan (*royalti/fee*) atas penggunaan ciptaannya.

Oleh karena itu, sebaiknya *organizer* melaporkan semua lagu yang akan dibawakan dalam pertunjukan musik itu kepada LMK untuk meminimalisasi potensi konflik. Dan di beberapa negara, daftar putar lagu di sebuah pertunjukan musik itu menjadi syarat wajib. Tanpanya, izin mengadakan pertunjukan musik tidak akan ada.

Dan sepertinya itu dapat juga diterapkan di Indonesia sebagai solusi dari momok sengketa royalti yang saat ini terjadi di industri musik nasional.

DAFTAR ISI



BERANDA	3
LIPUTAN	9
FIGUR	13
TAJUK	19





VENUE

AKSI MEDIA GRAHAFITIA

member of **Dyandra** & Co.

PEMIMPIN UMUM Bayu Hari Himawan
PEMIMPIN REDAKSI Bayu Hari Himawan
REDAKTUR PELAKSANA Harry Purnama
STAF REDAKSI Bonita Ningsih
FOTOGRAFER Erwin Gumilar
DESAIN VISUAL Annisa Amalia
SEKRETARIS REDAKSI Yuli Andriastuti
PUBLISHING TEAM Murdiyatno
Annisa Amalia
Ibni Reisha Pahlevi

IKLAN Rostiana Br. Karo
Soaeni Latif

KORESPONDEN Ludhy Cahyana
(Surabaya)
Nila Sofiyanti
(Bali)
Tonggo Simangunsong
(Medan)

PENERBIT PT Dyandra Promosindo

Jl. Johar No.9 Menteng, Jakarta Pusat 10350
T: 021 - 3107117, F: 021 - 3903848
E: redaksi@venuemagz.com
W: www.venuemagz.com

Rekening. 7340306117
Bank BCA
Gedung Plaza Bank Index Jakarta Pusat
An. PT Dyandra Promosindo

KOMITMEN GENJOT PRODUKSI, PEMERINTAH DENGARKAN ASPIRASI PELAKU USAHA



TANGERANG, 22 Mei 2025 - Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan gairah investasi hulu migas melalui keterbukaan terhadap masukan dari para pelaku usaha. Untuk itu kedepannya kebijakan pemerintah akan terus fleksibel.

Djoko Siswanto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), menegaskan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah mendengarkan apapun yang menjadi perhatian para pelaku usaha.

“Pesan Presiden jelas untuk menghapus regulasi menyusahkan. Ini jelas bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi pelaku usaha yang memberikan motivasi kuat untuk melanjutkan kolaborasi yang membangun antara pelaku usaha dan pemerintah di masa depan,” jelas Djoko dalam pidato penutupan IPA Convex 2025 di ICE BSD, Kamis (22/5).



Tahun ini banyak penandatanganan kontrak blok migas, beberapa kesepakatan jual beli gas hingga pemanfaatan gas.



Djoko Siswanto

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas

Lebih lanjut menurut Djoko, kehadiran Presiden Prabowo dalam pelaksanaan IPA Convex 2025 adalah

pesan nyata bagaimana pemerintah siap meningkatkan kolaborasi dengan pelaku usaha untuk segera mengeksekusi setiap *road map* yang sudah disepakati bersama. “Jadi tidak hanya di event ini tapi semangat kolaborasi harus terus berlanjut sehingga target tidak hanya sekedar wacana dan bisa terealisasi,” tegas Djoko.

Untuk tahun ini peningkatan produksi minyak ditargetkan mulai terjadi. Pemerintah menargetkan pertambahan produksi akan berasal dari lapangan Banyu Urip yang dikelola ExxonMobil sebesar 30 ribu barel per hari (bph). Kemudian dalam kurun waktu hingga tahun 2030 nanti produksi akan terus meningkat hingga menyentuh 800 ribu hingga 900 ribuan bph.

Untuk itu SKK Migas, kata Djoko meminta agar Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) segera mengajukan rencana programnya baik itu eksplorasi ataupun pengembangan kepada pemerintah agar segera dilakukan pembahasan rencana pengembangannya. “Kepada KKKS segera bawa rencana program eksplorasi dan produksinya termasuk WP&B yang termasuk *filling the gap programi*,” ujar Djoko.

Pemerintah mencatat semakin banyak pelaku usaha yang bersemangat menggenjot produksi melalui peningkatan kegiatan serta banyak yang mulai mencari lagi cadangan migas melalui kegiatan eksplorasi dengan ikut dalam penawaran blok migas, ternyata antusiasme tinggi juga ditunjukkan terhadap pengembangan teknologi Carbon Capture Storage (CCS).

IPA Convex tahun ini juga jadi momentum terbaik sekaligus titik balik kebangkitan industri migas nasional karena selama tiga hari pelaksanaan terjadi berbagai kesepakatan serta perjanjian dalam pengelolaan blok migas, pemanfaatan gas, hingga ke kesepakatan kerjasama dalam pengembangan teknologi yang akan diimplementasikan.

“Semangat kita terus tumbuh, terutama tahun ini banyak penandatanganan kontrak blok migas, beberapa kesepakatan jual beli gas hingga pemanfaatan gas. Ini semakin menunjukkan bukti bahwa industri kembali aktif menggeliat,” jelas Djoko.

Carole J. Gall, President Indonesia Petroleum Association (IPA), mengapresiasi komitmen yang ditunjukkan pemerintah Indonesia yang terus berinisiatif untuk memperbaiki regulasi serta berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Semuanya sangat penting dalam memastikan keberhasilan bisnis hulu migas di Indonesia. Oleh karena itu, kami



optimistis industri migas memiliki masa depan yang baik. Kami juga telah mendengar dari para CEO dan para ahli yang menyimpulkan bahwa kita dapat mengatasi tantangan transisi energi melalui kolaborasi yang baik,” jelas Carole.

Hariadi Budiman, Ketua Panitia IPA Convex IPA 2025, mengakui antusiasme para pihak yang terlibat dalam pagelaran IPA tahun ini. Tahun ini ada peningkatan pengunjung sebanyak 32.000 dibandingkan tahun lalu yang sebesar 29.000. Kemudian ada 3000 delegasi tumbuh dibandingkan 2700 di tahun lalu. Tahun ini juga ada pertumbuhan negara yang terlibat sebanyak 60 negara dibandingkan tahun lalu sebanyak 51 negara.

“Dari sisi *exhibitor* ada peningkatan signifikan dari 179 peserta tahun lalu menjadi 216 peserta di tahun ini. Serta untuk tahun ini lebih banyak *plenary session* yang diselenggarakan sebanyak 14 plenary session serta lebih dari 100 pembicara dari berbagai program hadir di IPA Convex tahun ini. Selain itu tahun ini juga hadir 3.005 delegasi dari 60 negara.”

Sementara itu, dalam program TPC, total ada 161 presentasi poster dan oral. “Dengan adanya peningkatan ini kami berharap ini jadi sinyal positif bahwa industri ini makin menggeliat,” kata Hariadi.



23 to 25 September 2025 • Bangkok, Thailand



The Leading International MICE & Corporate Event Centered In Asia-Pacific

[NEW HIGHLIGHTS]



Largest Collection of international MICE & Corporate Destinations, Product & Service Suppliers & Buyers



Enticing Hosting Programme for eligible in-person buyers



Beyond One-to-One Business Appointments with business engagements and networking opportunities to facilitate meaningful connections



Distinct Event Programmes including perennial IT&CMA and CTW APAC favourite segments



New Innovative Buyer Engagement Platforms & Expanded Incentive Scheme to motivate buyers' performance



Not 1 But 3 Valuable Buyer Segments with dedicated programme for each delegate profile

[REGISTER NOW]



www.itcma.com | www.corporateworld.com/apac
for event updates, programme and participation information

DIAMBIL ALIH PEMERINTAH, HARGA SEWA JICC JUSTRU LEBIH MAHAL



Alih-alih jadi andalan baru industri MICE, Jakarta International Convention Centre (JICC) malah ditinggal para penyelenggara acara. Alasannya sederhana: harga sewanya makin mahal!

Oleh: Harry Purnama



Harusnya apa yang ada di JICC sudah termasuk di dalam paket penjualan. Sama seperti kalau kita mengadakan acara di hotel, barang-barang yang ada di kamar bisa kita pakai secara gratis untuk keperluan acara, seperti *safe deposit box* bisa kita bawa ke *ballroom*,”



Muhammad Reza Abdullah
President Director
Royalindo

Salah satu alasan mengapa industri MICE Indonesia tertinggal dari negara tetangga seperti Thailand dan Singapura adalah dari harga sewa gedungnya yang terbilang lebih mahal. Pasalnya, gedung-gedung *convention* dan *exhibition* yang besar di luar negeri dimiliki oleh negara atau pemerintah setempat.

Sementara di Indonesia, meski secara luas tidak kalah dengan gedung di luar negeri, hampir mayoritas gedung-gedung *exhibition* dan *convention* dimiliki oleh pihak swasta. Jadi, wajar saja kalau pemilik gedung mengenakan harga sewa yang mahal, supaya menutupi biaya operasional dan juga mencari *revenue* yang besar.

Harapan untuk memiliki gedung dengan harga sewa yang lebih murah sempat ada ketika Jakarta Convention Center (JCC) diambil alih oleh negara melalui PPKGBK (Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno). Namun, sejak resmi berganti pengelola sekaligus berganti nama menjadi Jakarta International Convention Centre (JICC) pada Januari 2025, yang terjadi malah sebaliknya: harga sewanya lebih mahal dibandingkan sebelumnya ketika JCC dikelola oleh PT Graha Sidang Pratama.

Reza Abdullah, Presiden Direktur Royalindo Expoduta, mengatakan, penyebab harga sewa JICC menjadi lebih mahal karena PPKGBK hanya menyewakan ruang kosong kepada *organizer*. Sementara kebutuhan pendukung lainnya, seperti meja, kursi, karpet, hingga catering dikenakan biaya tambahan lagi. Ujung-ujungnya, uang yang dikeluarkan oleh *organizer* untuk berpameran atau *meeting* di JICC menjadi lebih mahal.

Tak ayal, sejumlah pameran dan acara pun memilih untuk pindah *venue*, seperti ke JIExpo, ICE, maupun NICE. Reza mengatakan, sekarang ICE sudah penuh acara untuk setahun. Bahkan, NICE yang belum selesai dibangun dan diperkirakan baru mulai beroperasi pada September 2025, itu sudah penuh dipesan hingga Desember 2025.

Artinya, tugas rumah pemerintah, dalam hal ini PPKGBK, sangat besar untuk membenahi pengelolaan JICC agar kembali menjadi primadona para *organizer* untuk mengadakan acara di Jakarta. Kalau tak berbenah, bukan tidak mungkin episentrum MICE Indonesia akan bergeser ke tempat lain.

KEMENTERIAN PARIWISATA SIAPKAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN WISATA EDUKASI

Di tengah meningkatnya kekhawatiran atas keselamatan dalam perjalanan wisata edukasi bagi siswa sekolah, Kementerian Pariwisata mengambil langkah strategis dengan menyusun pedoman khusus untuk penyelenggaraan wisata edukasi.

Oleh: Harry Purnama

Maraknya kecelakaan bus maupun kecelakaan lainnya dalam perjalanan wisata anak-anak sekolah membuat sejumlah pemerintah daerah mengeluarkan larangan untuk mengadakan kegiatan *study tour* ke luar provinsi pada awal tahun 2025 ini. Larangan tersebut dimulai oleh pemprov Jawa Barat, yang kemudian disusul oleh Pemprov Banten dan Jakarta.

Keluarnya larangan dari pemprov tersebut tidak hanya membuat para siswa dasar dan menengah “menjerit”, tapi juga para pelaku perjalanan wisata turut “menjerit” karena membuat pendapatan mereka menurun. Pasalnya, setiap perjalanan *study tour*, jumlah peserta yang berangkat jumlahnya ratusan sehingga membawa berkah ekonomi yang besar.

Herdi Herdiansyah, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Banten, mengatakan, dikeluarkannya imbauan untuk tidak mengadakan *study tour* ke luar provinsi karena beberapa alasan. Selain alasan karena terjadi banyak kecelakaan, alasan lainnya adalah kesulitan



untuk mengontrol siswa yang jumlahnya bisa mencapai 500 orang dalam sekali perjalanan karena jumlah pendampingnya juga terbatas.

“Alasan yang ketiga adalah masalah biaya bagi orang tua yang tidak mampu,” ujar Herdi saat menjadi pembicara dalam acara diskusi “Dilarang atau Diatur? Mencari Titik Temu antara *Study Tour* dan Masa Depan Pariwisata” yang diadakan oleh Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Forwaparekraf) pada 14 Mei 2025.

Sementara itu, Satriawan Salim, Koordinator Nasional P2G (Perhimpunan Pendidikan dan Guru), mengatakan, ada dua jenis perjalanan para siswa sekolah, yakni studi tanpa tur, dan tur tanpa studi. Menurutnya, kegiatan yang harusnya dilarang adalah tur tanpa studi karena tidak ada kegiatan riset, observasi, dan lainnya dalam perjalanan tersebut.

Sementara, kegiatan studi tanpa tur harus tetap dijalankan, seperti *field trip* atau *live in*. Pasalnya, kegiatan studi tanpa tur termasuk dalam teori *outdoor learning*, dan secara akademis basis pedagogisnya sangat jelas.



“Banyak riset menunjukkan bahwa belajar di kelas itu menjemukan, apalagi kalau hanya mengerjakan LKS. Jadi, siswa butuh pembelajaran yang relevan dan kontekstual, yakni melalui *outdoor learning* tadi. Bagi kami, studi tanpa tur itu masuk dalam pembelajaran berbasis proyek dalam rangka *outdoor learning*,” ujar Satriawan.

Oleh karena itu, Satriawan menambahkan, kegiatan *study tour* lebih baik tidak dilarang, tapi diatur. Ada tiga hal yang menurutnya harus diperjelas, yakni tenaga pendamping harus jelas dan banyak, lalu faktor keselamatan dan kesehatan harus diperhatikan, serta peran negara melalui dana BOS untuk membantu orang tua yang tidak mampu.

Donny, *Managing Director* Adonta Education selaku *study tour operator*, mengatakan, di Australia, rasio yang tepat antara jumlah murid dengan pendamping adalah 10 banding 1, yakni setiap 10 murid harus didampingi oleh 1 orang.

Menanggapi polemik yang ada, Rizki Handayani, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, mengatakan bahwa Kemenpar saat ini sedang menyusun pedoman penyelenggaraan wisata edukasi, yang antara lain di dalamnya mencakup *risk assessment* dan *regulatory compliance*.

“Kami juga sedang bicara dengan Asita dan lainnya agar ada operator khusus untuk menyelenggarakan *study tour* ini, yang harus tahu cara *bidding* dengan dinas pendidikan serta dan dinas kesehatan dan sekolah,” ujar Rizki.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyampaikan, “Yang paling penting adalah apa yang didapat oleh anak-anak kita, bukan tentang banyaknya duit di sektor pariwisata. Kita harus menciptakan wisata edukasi yang aman dan nyaman buat anak-anak kita dan juga industri pariwisatanya.”



Putrajaya Marriott Hotel Dukung Ambisi Malaysia Menjadi Destinasi MICE Internasional

Malaysia berhasil mendapatkan 123 kegiatan MICE internasional antara tahun 2022 hingga 2030, yang diproyeksikan dihadiri 177.000 delegasi dan menghasilkan RM1,4 miliar atau sekitar Rp 5,2 triliun. Selain itu, Johor juga akan menjadi tuan rumah ASEAN Tourism Forum 2025. Dengan dampak ekonomi yang begitu besar, Malaysia mulai menargetkan untuk fokus ke industri MICE.

Nikie Mok, *General Manager* Putrajaya Marriott Hotel, berbagi cerita mengenai transformasi sektor MICE di Malaysia, serta apa yang sedang dilakukan Malaysia untuk bersaing di regional Asia Tenggara. Berikut wawancara lengkapnya.



Nikie Mok,

General Manager
Putrajaya Marriott Hotel

1. Kenapa Malaysia mulai fokus ke industri MICE? Apa yang melatarbelakanginya?

Malaysia sejak lama telah melihat potensi industri MICE. Namun, beberapa tahun belakangan, sektor ini tumbuh pesat sebagai penggerak ekonomi utama. Perkembangan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas bisnis di regional, bertumbuhnya kegiatan korporasi, dan infrastruktur pendukung yang membaik.

Selain itu, persepsi terhadap sektor MICE juga berubah, bukan lagi sekadar kegiatan pertemuan formal. Saat ini, *event organizer* mencari *venue* yang unik, fleksibel, dan menarik secara visual. Sektor korporat juga kini lebih senang mencari *venue* yang hibrid dan menerapkan prinsip berkelanjutan.

Putrajaya Marriott Hotel merespons perubahan tren tersebut dengan mengintegrasikan berbagai elemen, seperti *Meeting Impact Reports (MIR)*, opsi *carbon offset*, dan aktivitas tambahan seperti yoga dan *team building* di dalam paket *meeting* yang ditawarkan.



Kesuksesan Malaysia dalam memenangkan 123 event MICE besar antara tahun 2022-2030, yang diperkirakan mendatangkan 177.000 delegasi dengan pengeluaran RM1,4 miliar, mencerminkan potensi besar dari sektor MICE

Nikie Mok,
General Manager
 Putrajaya Marriott Hotel

2. Mengapa lebih memilih untuk fokus ke industri MICE daripada pasar *leisure* mengingat Malaysia memiliki banyak destinasi wisata?

Industri MICE sangat menjanjikan karena dampak ekonominya yang besar. Wisatawan bisnis biasanya menghabiskan waktu 3-5 kali lebih lama dibandingkan turis biasa, dan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi sektor perhotelan, acara, transportasi, dan UMKM lokal. Tak seperti wisatawan biasa yang hanya datang pada musim-musim tertentu, kegiatan MICE menghadirkan wisatawan yang stabil sepanjang tahun sehingga memastikan stabilitas jangka panjang bagi sektor perhotelan.



Family Splash Pool



Hotel Facade



Swimming Pool Top View

Selain itu, mayoritas turis bisnis juga memperpanjang masa tinggalnya untuk berlibur, atau juga dikenal dengan istilah *bleisure*. Putrajaya Marriott berusaha memenuhi kebutuhan turis *bleisure* dengan tidak hanya menyediakan fasilitas MICE, tapi juga fasilitas hiburan, seperti lapangan golf Palm Garden Golf Club atau berbelanja di IOI City Mall.

Kemudian, sektor MICE juga mendukung target nasional untuk menjadikan Malaysia sebagai hub bisnis strategis. Dengan memprioritaskan MICE, Malaysia tidak hanya memperkuat posisinya di pasar korporat, tapi juga menghadirkan ekonomi yang stabil dan bervariasi di sektor pariwisata.



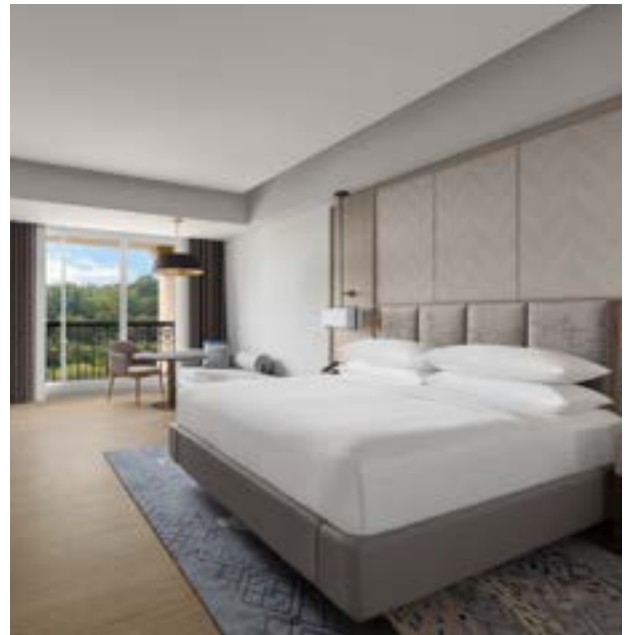
Greatroom

3. Apa yang membuat Malaysia percaya diri dapat bersaing dengan Thailand dan Singapura dalam menarik pasar MICE global?

Didukung oleh akses yang mudah, infrastruktur bisnis dan wisata yang terintegrasi, serta harga yang bersaing, Malaysia yakin bisa berkompetisi di sektor MICE dengan negara lainnya. Dibandingkan Thailand dan Singapura, Malaysia menawarkan *venue* berstandar tinggi dan layanan dengan harga terjangkau sehingga *organizer* dapat memaksimalkan bujetnya untuk mengakses infrastruktur kelas dunia.

Salah satu keunggulan Malaysia adalah memiliki destinasi liburan dan juga fasilitas MICE di satu tempat sehingga para tamu bisa mengadakan kegiatan bisnis sekaligus berlibur. IOI Resort City dan Putrajaya Marriott Hotel merupakan salah satu contoh keunggulan kompetitif Malaysia dengan menyediakan fasilitas premium dengan harga yang atraktif dibanding negara tetangganya.

Selain itu, Putrajaya Marriott Hotel memiliki Marriott Putrajaya International Convention Centre yang unik, di mana properti ini menggabungkan kegiatan bisnis dengan aktivitas *team building*, pengalaman budaya, dan solusi ramah lingkungan.



Exec Deluxe King



Dining Area Palace Suite



Exec Lounge

4. Strategi apa yang akan dijalankan untuk dapat bersaing dengan Singapura dan Thailand untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi MICE dunia?

Alih-alih bersaing langsung dengan Singapura sebagai pusat finansial dan Thailand sebagai destinasi pariwisata, Malaysia membedakan dirinya dengan menawarkan *customization*, aksesibilitas, dan fasilitas *bleisure* yang terintegrasi.

Kunci pentingnya adalah fleksibilitas. Putrajaya Marriott Hotel memungkinkan para penyelenggara acara untuk mendesain aktivitas *team building* bersamaan dengan program *wellness* dan kegiatan ramah lingkungan lainnya. Kemampuan beradaptasi ini membuat Malaysia pilihan menarik untuk kegiatan MICE di masa depan.

Investasi di bidang konektivitas dan infrastruktur juga salah satu keunggulan Malaysia. Dengan adanya konektivitas Singapore-IOI Resort City Express Line menjadikan Malaysia memiliki daya tarik lebih untuk kegiatan korporat global maupun regional. Lokasi IOI Resort City yang jauh dari pusat kota juga menawarkan suasana yang baik untuk *retreat* atau *summit* korporat.

Selain itu, Putrajaya Marriott juga menjalankan praktik berkelanjutan melalui program Connect Responsibly, laporan MIR (Meeting Impact Report), dan *carbon offset* sehingga *venue* ini bisa menjadi pilihan menarik bagi korporat yang mengedepankan prinsip ESG.



Bathroom Amenities



Kids Setup



Palace Suite

5. Sejauh mana peran Putrajaya Marriott Hotel untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi MICE internasional?

Putrajaya Marriott Hotel menjadi salah satu kunci penting dalam memperkuat posisi Malaysia sebagai destinasi MICE dunia dengan menawarkan konektivitas yang mudah, fasilitas MICE kelas dunia, dan pengalaman dipersonalisasi untuk segala jenis acara.

Salah satu keunggulan utama Putrajaya Marriott Hotel adalah lokasinya yang strategis di dalam kawasan IOI Resort City sehingga memudahkan akses ke Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Putrajaya Sentral, dan akses kereta cepat IOI Resort City Express Line ke Singapura. Hal tersebut tentunya akan memudahkan para delegasi internasional untuk datang ke Malaysia.



Room View Junior Suite



Bathroom Palace Suite



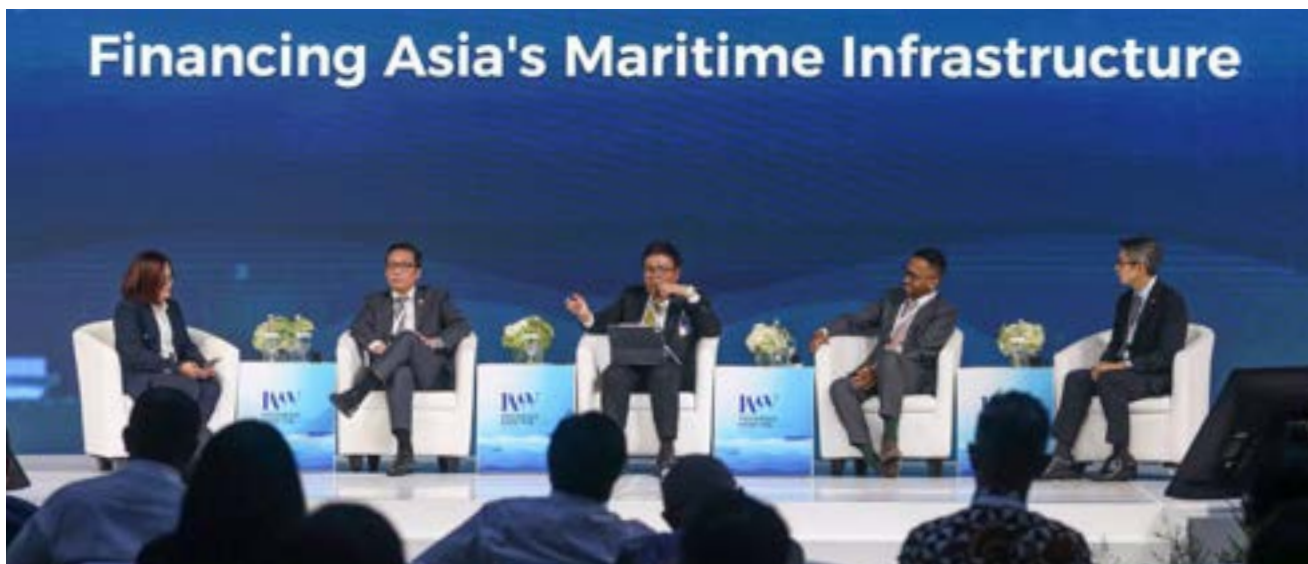
Room View Deluxe Twin



Room View Exec Suite

Marriott Putrajaya International Convention Centre (MPICC) juga memperkuat Putrajaya Marriott Hotel untuk memikat delegasi MICE internasional. Hotel ini juga memiliki lebih dari 20 ruang pertemuan fleksibel dan fasilitas teknologi *meeting* hibrid, termasuk layar LED 3D di MPICC yang tidak hanya menambah kesan modernitas, tapi juga lebih ramah lingkungan.

Putrajaya Marriott hotel juga memiliki 487 kamar dengan interior modern, teknologi terbaru, dan *amenities* premium yang dapat mengakomodir kebutuhan wisatawan bisnis maupun *leisure*. Selain itu, IOI Resort City juga memiliki akses luas ke beberapa akomodasi lainnya untuk dapat menerima lebih banyak lagi delegasi internasional.



Pendapat Pelaku MICE dan Pariwisata Terhadap Kebijakan Pemerintah



**Mulkan Kamaludin,
Dewan Pembina IVENDO**

“Terkait efisiensi anggaran pemerintah, sebenarnya kami tidak menolak dengan adanya kebijakan tersebut. Namun, alangkah baiknya jika pemangkasan anggarannya jangan terlalu besar yang kalau dirata-ratakan bisa mencapai 50 persen lebih. Kalau terlalu besar akan mengganggu bisnis di industri *event* karena dampaknya bisa ke mana-mana. Tidak hanya dari pemerintah, tetapi permintaan *event* dari pihak swasta juga otomatis ikut turun.

Berdasarkan survei yang sudah kami lakukan, ada sekitar 638 *event* di Indonesia yang dibatalkan selama periode 5-11 Februari 2025. Kebanyakan yang membatalkan dari segmen K/L, Pemda, dan BUMN sebanyak 80,88 persen. Lalu, 20 persen sisanya dari swasta.

Rata-rata bisnis *loss*-nya Rp295 miliar, itu baru data selama satu minggu saja.

Kalau kondisinya terus berlanjut sampai akhir tahun ini, sudah dipastikan bisnis *event* akan turun hingga 80 persen. Misalnya, kita lihat dari omzet bisnis anggota IVENDO di tahun 2024 menyentuh Rp84,4 triliun, dengan adanya kebijakan tersebut diprediksi omzet 2025 hanya menyisakan Rp16 triliun.

Oleh sebabnya, kami berharap pemangkasan anggaran pemerintah jangan terlalu besar, mungkin bisa di angka 30 persen saja. Hal ini sangat membantu kami di industri *event* agar dapat mempertahankan bisnisnya hingga akhir tahun.”



**Pauline Suharno,
Ketua Umum ASTINDO**

“Kalau terkait pelarangan *study tour*, jujur saja dampaknya kurang terasa untuk anggota ASTINDO karena tidak banyak yang *handle* acara dari sekolah. Sementara, efisiensi anggaran pemerintah memberikan dampak cukup besar bagi anggota kami, khususnya yang ada di daerah. Biasanya ada perjalanan dinas ke daerah, sekarang sudah tidak ada. Begitu juga partisipasi pemerintah dalam berbagai *event* daerah, pasti dikurangi juga.

Paling terasa di 5 Destinasi Super Prioritas dan Bali yang selama ini selalu didukung pemerintah dalam pengadaan *event*. Secara keseluruhan, bisnis anggota ASTINDO rata-rata turun 30 persen dengan adanya efisiensi anggaran pemerintah ini.

Namun, untuk *travel agent* yang berada di wilayah seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, efisiensi anggaran pemerintah ini dampaknya tidak terlalu besar karena mereka masih punya market *outbound* yang dari segi persentase lebih besar jika dibandingkan penyelenggaraan *event* pemerintah. Jadi, bisnis mereka di tahun ini masih aman karena bisa mencari alternatif bisnis lainnya.”



**Heben Ezer,
Product & Operation Manager XPOSE
Leisure Management**

“Secara keseluruhan, kedua aturan ini menjadi pukulan berat bagi *travel agent* yang utamanya menjual tur domestik. Mereka yang biasa mengelola dan menjadi rekanan pemerintah, otomatis bisnisnya hilang. Begitu juga dengan mereka yang menjual produk *study tour* untuk sekolah negeri, bisnisnya hilang 100 persen.

Namun, kalau berbicara dari sisi *travel agent* saya, kedua aturan ini tidak terlalu berpengaruh dengan bisnis kami. Alasannya karena kami tidak *handle event* pemerintah dan tidak banyak *handle* sekolah negeri karena aturan pelarangan *study tour* ini ‘kan dikhususkan untuk sekolah negeri.



Meski demikian, kedua kebijakan tersebut membuat bisnis *travel agent* kami turun sebanyak 30 persen. Meskipun pelarangan *study tour* ini hanya berlaku untuk sekolah negeri, tetapi beberapa sekolah swasta ikut mengurangi kegiatan tersebut. Hal ini terjadi karena kondisi ekonomi yang kurang stabil di negeri ini. Jadi, banyak orang tua yang mulai menghemat pengeluarannya sehingga sekolahnya meniadakan *study tour*.

Saya berharap aturan ini dievaluasi dan dikaji ulang, khususnya pelarangan *study tour*. Untuk menunggu itu semua, kami mencoba untuk mencari bisnis lainnya seperti membuat paket tur virtual bagi sekolah-sekolah. Harga yang ditawarkan juga jauh lebih murah ketimbang datang ke lokasi langsung.”



**M. Reza Abdullah,
CEO PT Royalindo Expoduta**

“Dengan adanya efisiensi anggaran pemerintah ini, membuat bisnis kita drop. Biasanya, *event* pemerintah itu mulai banyak setelah kuartal 2 atau setelah Maret. *Nah*, di awal tahun biasanya sudah terlihat tender dari mereka, tapi tahun ini tidak ada sama sekali. Akhirnya, kita cari kerjaan ke swasta dan asosiasi walaupun potensinya tidak sebagus pemerintah.

Adanya efisiensi ini tentu perjalanan dinas pemerintah juga ditiadakan. Hal itu berdampak ke banyak pekerja pariwisata



karena dari uang SPPD itu, sebagiannya untuk belanja oleh-oleh atau souvenir sehingga pariwisata itu sektornya langsung terasa ke masyarakat.

Padahal, bisnis MICE di luar negeri sekarang ini lagi bagus-bagusnya. Tetapi, kenapa sekarang kita justru diam saja? Dulu, saat masih COVID-19, MICE Indonesia yang paling cepat *recovery* karena terbantu G20, ASEAN Tourism Forum, hingga World Water Forum. Sedangkan, negara-negara tetangga belum pada aktif waktu itu. Sekarang, malah industri MICE kita tidak berjalan.

Kalau di Jakarta mungkin tidak terlalu ‘gelap’ ya, tetapi secara nasional bisa dibilang ‘gelap’ bisnis MICE. Bisnis saya sendiri saja sudah turun 50 persen hingga April, karena memang 80 persen bisnis kita ada di pemerintahan. Semoga efisiensi anggaran ini tidak terjadi sampai akhir tahun.”



Andi Gevika Rizki,
General Manager Aston Priority
Simatupang & Conference Center

“Sebagai hotel bisnis, adanya efisiensi anggaran pemerintah berdampak cukup signifikan terhadap pendapatan hotel dengan menurunnya tingkat hunian kamar (okupansi), penggunaan ruang *meeting*, dan *ballroom*. Kebijakan ini juga memberikan efek domino ke sektor lainnya seperti EO, PCO, dan perusahaan swasta terkait yang biasa menjadi mitra kami. Terjadi ketidakpastian perencanaan bisnis

karena *event-event* yang biasanya bersifat rutin masih dikaji dan anggarannya belum dapat dipastikan.

Pada Maret 2025, terjadi penurunan 28 persen hunian kamar dan turun 47 persen untuk okupansi *banquet* atau MICE jika dibandingkan Maret 2024. Keseluruhan *revenue* hotel pada Maret 2025 turun 40 persen jika dibandingkan Maret 2024.

Kami harap pemerintah bisa lebih bijaksana dalam melakukan penerapan efisiensi dan dilakukan bertahap sehingga dampak yang dirasakan tidak langsung secara drastis berubah. Perputaran ekonomi secara menyeluruh pun akan sangat berdampak hingga ke *supply* awal, yaitu petani dan peternak.”

THE 23rd IFRA BUSINESS EXPO x ICE 2025

FROM ESSENTIAL INGREDIENTS TO EXTRAORDINARY OPPORTUNITIES

25 - 27 April 2025

Indonesia Convention Exhibition (ICE)

BUY YOUR TICKET NOW

AVAILABLE AT: IFRA-INDONESIA.COM

